



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 24 / KEP / HK / 2020**

TENTANG  
GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memperbaiki dan membangun karakter bangsa Indonesia perlu melaksanakan Revolusi Mental yang mengacu pada nilai- nilai integritas, etos kerja dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila;
  - b. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental, perlu membentuk Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental di Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); u

4. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental;

**MEMUTUSKAN :**


**Menetapkan :**

**KESATU** : Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**KEDUA** : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok dan fungsi:

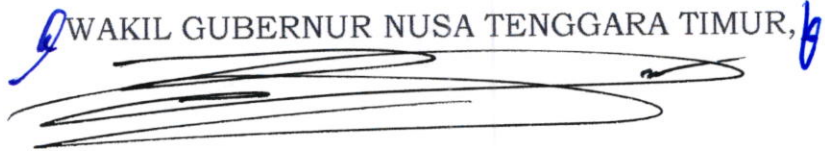
- a. merumuskan kebijakan dan strategi pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental di Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. merencanakan program dan anggaran serta melaksanakan Gerakan Nasional Revolusi Mental di Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. melaksanakan sosialisasi dan edukasi Gerakan Nasional Revolusi Mental kepada Perangkat Daerah dan masyarakat;
- d. melaksanakan kerjasama Gerakan Nasional Revolusi Mental dengan pelaku Gerakan Nasional Revolusi Mental;
- e. menyusun petunjuk pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental yang mengacu pada Pedoman Teknis Gerakan Nasional Revolusi Mental Kementerian Dalam Negeri;
- f. melakukan Pemantauan dan Evaluasi Gerakan Nasional Revolusi Mental di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- g. melaporkan pelaksanaan kegiatan Gerakan Nasional Revolusi Mental kepada gugus tugas Kementerian Dalam Negeri setiap 4 (empat) bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
- h. menyiapkan mekanisme dalam menangani pengaduan.

**KETIGA** : Susunan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

**KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini. 

- KELIMA** : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan administrasi Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
  - b. menyiapkan bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 27 JANUARI 2020

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,   
**JOSEF ADREANUS NAE SOI**

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan di Jakarta;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta;
4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman di Jakarta;
5. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
6. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
7. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 24 /KEP/HK/2020****TANGGAL : 27 JANUARI 2020****SUSUNAN GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL  
REVOLUSI MENTAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2020**

<b>NO.</b>	<b>NAMA / JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS</b>	<b>URAIAN TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. memberikan arahan terkait pelaksanaan tugas Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan b. memberikan gambaran terkait pelaksanaan tugas Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua I	
3.	Kepala Kepolisian Daerah NTT	Wakil Ketua II	
4.	Kepala Kejaksaan Tinggi NTT	Wakil Ketua III	
5.	Komandan Korem 161/WS Kupang	Wakil Ketua IV	
6.	DANLANUD El Tari Kupang	Wakil Ketua V	
7.	DANLANTAMAL Kupang	Wakil Ketua VI	
8.	Ketua KOMINDA Provinsi NTT	Wakil Ketua VII	
9.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pelaksana Harian	a. mengoordinasikan dengan Instansi terkait dalam Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Provinsi Nusa Tenggara Timur; b. mengoordinasikan hasil Penyusunan Laporan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan c. bertanggungjawab secara administrasi.
10.	Kepala Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Sekretaris	a. membantu pelaksanaan tugas Ketua Gugus Tugas Gerakan nasional Revolusi Mental Provinsi Nusa Tenggara Timur; b. membantu menyusun rencana kerja pelaksanaan Ketua Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan c. membantu menyusun anggaran pendanaan Ketua Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Provinsi Nusa Tenggara Timur.
11.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Wakil Sekertaris I	
12.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Wakil Sekertaris II	

u

**1. GUGUS TUGAS GERAKAN NTT MELAYANI**

1.	Kepala Dinas Pemanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT	Koordinator	<ol style="list-style-type: none"><li>a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara;</li><li>b. peningkatan Penegakan disiplin Aparatur Pemerintah dan Penegak Hukum;</li><li>c. penyempurnaan standar pelayanan dan sistem pelayanan yang inovatif (e-government);</li><li>d. penyempurnaan sistem manajemen kinerja (performance-based management system);</li><li>e. peningkatan perilaku pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel, dan responsif;</li><li>f. penyempurnaan peraturan perundang-undangan (deregulasi);</li><li>g. penyederhanaan pelayanan birokrasi (debirokratisasi);</li><li>h. peningkatan penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan publik;</li><li>i. penurunan Indeks Persepsi Korupsi;</li><li>j. peningkatan penegakan hukum dan aturan di bidang pelayanan publik; dan</li><li>k. penerapan sistem penghargaan dan sanksi beserta keteladanan pimpinan.</li></ol>
2.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Anggota	
3.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	
4.	Kepala Dinas Kominfo Provinsi NTT	Anggota	
5.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT	Anggota	
6.	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT	Anggota	
7.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Anggota	
8.	Kepala BPSDM Provinsi NTT	Anggota	
9.	Kepala BPBD Provinsi NTT	Anggota	
10.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
11.	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
12.	Kepala Biro Pengadaan Barang /Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	
13.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	
14.	Inspektur Daerah Provinsi NTT	Anggota	

15.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara;</li> <li>b. peningkatan Penegakan disiplin Aparatur Pemerintah dan Penegak Hukum;</li> <li>c. penyempurnaan standar pelayanan dan sistem pelayanan yang inovatif (e-government);</li> <li>d. penyempurnaan sistem manajemen kinerja (performance-based management system);</li> <li>e. peningkatan perilaku pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel, dan responsif;</li> <li>f. penyempurnaan peraturan perundang-undangan (deregulasi);</li> <li>g. penyederhanaan pelayanan birokrasi (debirokratisasi);</li> <li>h. peningkatan penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan publik;</li> <li>i. penurunan Indeks Persepsi Korupsi;</li> <li>j. peningkatan penegakan hukum dan aturan di bidang pelayanan publik; dan</li> <li>k. penerapan sistem penghargaan dan sanksi beserta keteladanan pimpinan.</li> </ul>
16.	Direktur RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang	Anggota	
17.	Direktur UPTD Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang	Anggota	
18.	Direktur PT. Semen Kupang	Anggota	
19.	Pimpinan Redaksi Pos Kupang	Anggota	
20.	Pimpinan Trans Nusa Kupang	Anggota	
21.	Direktur PT. Semen Kupang	Anggota	
22.	Ketua Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI) DPD NTT	Anggota	
23.	Ketua Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) NTT	Anggota	
24.	Ketua Yayasan Nusa Bunga Abadi NTT	Anggota	
25.	Ketua Rumah Perempuan	Anggota	
26.	Pimpinan Redaksi Pos Kupang	Anggota	

## II. GUGUS TUGAS GERAKAN NTT BERSIH

1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. NTT	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan keluarga, lingkungan kerja dan komunitas;</li> <li>b. peningkatan sinergi penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang perilaku hidup bersih dan sehat;</li> <li>c. pengembangan sistem pengelolaan sampah yang holistik dan terintegrasi termasuk kali bersih, sarana dan prasarana pelayanan publik;</li> <li>d. penyempurnaan peraturan perundang-undangan (deregulasi);</li> <li>e. pemberian kemudahan bagi perusahaan/swasta/lembaga yang melakukan pengelolaan sampah;</li> </ul>
2.	Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT	Anggota	
3.	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Anggota	
4.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	
5.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	

6.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT	Anggota	<p>f. mengutamakan peran serta masyarakat di dalam menunjang perilaku bersih dan sehat; dan</p> <p>g. peningkatan penegakan hukum di bidang kebersihan dan kesehatan lingkungan.</p>
7.	Kepala Biro Umum Setda Provinsi NTT	Anggota	
8.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
9.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTT	Anggota	
10.	Direktur BLUD-SPAM Provinsi NTT	Anggota	
11.	Ketua Ultras Victory NTT	Anggota	
12.	Ketua Arbeter Samariter Bund (ASB) NTT	Anggota	
13.	Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) NTT	Anggota	

### III. GUGUS TUGAS GERAKAN NTT TERTIB

1.	Inspektur Daerah Provinsi NTT	Koordinator	<p>a. peningkatan perilaku tertib penggunaan ruang publik;</p> <p>b. peningkatan perilaku tertib pengelolaan pengaduan;</p> <p>c. peningkatan perilaku tertib administrasi kependudukan;</p> <p>d. peningkatan perilaku tertib berlalu-lintas;</p> <p>e. peningkatan perilaku antri;</p> <p>f. peningkatan sinergi penyediaan sarana dan prasarana penunjang perilaku tertib;</p> <p>g. peningkatan penegakan hukum perilaku tertib; dan</p> <p>h. menumbuhkan lingkungan keluarga, satuan pendidikan, satuan kerja dan komunitas yang ramah dan bebas kekerasan.</p>
2.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	
3.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT	Anggota	
4.	Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Anggota	
5.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	
6.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	
7.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	

ny

8.	Kepala Biro Umum Setda Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan perilaku tertib penggunaan ruang publik;</li> <li>b. Peningkatan perilaku tertib pengelolaan pengaduan;</li> <li>c. Peningkatan perilaku tertib administrasi kependudukan;</li> <li>d. Peningkatan perilaku tertib berlalu-lintas;</li> <li>e. Peningkatan perilaku antri;</li> <li>f. Peningkatan sinergi penyediaan sarana dan prasarana penunjang perilaku tertib;</li> <li>g. Peningkatan penegakan hukum perilaku tertib; dan</li> <li>h. Menumbuhkan lingkungan keluarga, satuan pendidikan, satuan kerja dan komunitas yang ramah dan bebas kekerasan.</li> </ul>
9.	Kepala Kepolisian Daerah NTT	Anggota	
10.	DIRLANTAS POLDA NTT	Anggota	
11.	Kepala Satpol PP Prov. NTT	Anggota	
12.	Pimpinan Ombudsman Provinsi NTT	Anggota	
13.	Ketua Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) NTT	Anggota	
14.	Ketua DPW Tipikor NTT	Anggota	

**IV. GUGUS TUGAS GERAKAN NTT MANDIRI**

1.	Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan perilaku yang mendukung tercapainya kemandirian bangsa dalam berbagai sektor kehidupan;</li> <li>b. Peningkatan perilaku yang mendukung tercapainya pertumbuhan kewirausahaan dan ekonomi kreatif;</li> <li>c. Peningkatan peran koperasi dan UMKM terhadap ekonomi nasional;</li> <li>d. Peningkatan apresiasi seni, kreatifitas karya budaya dan warisan budaya;</li> <li>e. Peningkatan perilaku yang mendukung tercapainya pemerataan ekonomi dan pengembangan potensi daerah tertinggal;</li> <li>f. Peningkatan perilaku yang mendukung penggunaan produk dan komponen dalam negeri;</li> <li>g. Peningkatan kapasitas dan kompetensi Tenaga Kerja;</li> <li>h. Peningkatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, pangan, dan energi;</li> <li>i. Peningkatan sinergi penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang kemandirian di bidang ekonomi, pangan dan energi;</li> <li>j. Peningkatan penggunaan hasil penelitian dan pengembangan teknologi dalam negeri;</li> <li>k. Pemberian kemudahan bagi perseorangan atau Perusahaan Dalam</li> </ul>
2.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	
3.	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Anggota	
4.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota	
5.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. NTT	Anggota	
6.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. NTT	Anggota	
7.	Kepala Bapelitbangda Provinsi NTT	Anggota	
8.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
9.	Kepala Biro Ekonomi dan Kerjasama Setda Provinsi NTT	Anggota	

*11*

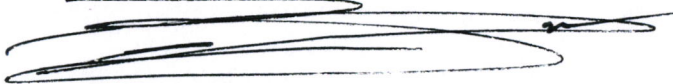
10.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTT	Anggota	<p>Negeri untuk mendaftarkan pemeliharaan Hak Kekayaan Intelektual;</p> <p>l. Peningkatan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat;</p> <p>m. Peningkatan pengakuan dan pemberian dukungan terhadap hasil karya atau prestasi anak bangsa;</p> <p>n. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan (deregulasi); dan</p> <p>o. Peningkatan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual dan perilaku usaha yang tidak sehat.</p>
11.	Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi NTT	Anggota	
12.	Dirintelkam Polda NTT	Anggota	
13.	Kabag. Reskrim Umum Polda NTT	Anggota	
14.	Pimpinan Perbankan dan Lembaga Keuangan	Anggota	
15.	Ketua TP PKK Provinsi NTT	Anggota	
16.	Ketua Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia (LKPI) NTT	Anggota	
17.	Ketua Yayasan Pengembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat (PIAR) NTT	Anggota	

**V. GUGUS TUGAS GERAKAN NTT BERSATU**

1.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Koordinator	<p>a. Peningkatan perilaku yang mendukung kehidupan demokrasi Pancasila;</p> <p>b. Peningkatan perilaku toleran dan kerukunan inter dan antar umat beragama;</p> <p>c. Peningkatan perilaku yang mendukung kesadaran nasionalisme, patriotisme, dan kesetiakawanan sosial;</p> <p>d. Peningkatan kebijakan yang mendukung persatuan dan kesatuan bangsa;</p> <p>e. Peningkatan perilaku yang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap kaum minoritas dan marjinal;</p> <p>f. Peningkatan dukungan terhadap inisiatif dan peran masyarakat di dalam pembangunan;</p> <p>g. Peningkatan perilaku kerjasama inter dan antar lembaga, komponen masyarakat dan lintas sektor;</p> <p>h. Peningkatan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa;</p>
2.	Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT	Anggota	
3.	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi NTT	Anggota	
4.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT	Anggota	
5.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	
6.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	
7.	Kepala Biro Humas Setda Provinsi NTT	Anggota	

8.	Kepala Biro Ekonomi dan Kerjasama Setda Provinsi NTT	Anggota	i. Penyelenggaraan pendidikan agama yang mengajarkan keragaman, toleransi, dan budi pekerti; dan j. Peningkatan peran lembaga agama, keluarga dan media publik dalam persemaian nilai-nilai budi pekerti, toleransi dan hidup rukun.
9.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTT	Anggota	
10.	Kepala Kanwil Kemenag. Provinsi NTT	Anggota	
11.	KASREM 161/WS Kupang	Anggota	
12.	Wakil Kepala Kepolisian Daerah NTT	Anggota	
13.	Kepala DIR. BNN POLDA NTT	Anggota	
14.	WADANLANUD El Tari Kupang	Anggota	
15.	WADANLANTAMAL Kupang	Anggota	
16.	Ketua KOMINDA Provinsi NTT	Anggota	
17.	WAKABIN Daerah Provinsi NTT	Anggota	
18.	Ketua FKUB, FPK, FKDM Prov. NTT	Anggota	
19.	Ketua FKPT Provinsi NTT	Anggota	
20.	Kapala BNNP Daerah Provinsi NTT	Anggota	
21.	Kepala BAIS Daerah Provinsi NTT	Anggota	
22.	Ketua Laskar Merah Putih NTT	Anggota	

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



**JOSEF ADREANUS NAE SOI**

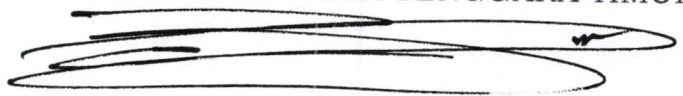
**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 24 /KEP/HK/2020****TANGGAL : 27 JANUARI 2020****SUSUNAN SEKRETARIAT GUGUS TUGAS  
GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2020**

<b>No.</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT</b>	<b>URAIAN TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan.
2.	Kepala Sub. Bidang Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Sekretaris	Mengoordinir dan melaksanakan serta bertanggungjawab terhadap operasional pelaksanaan kegiatan.
3.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Penanggungjawab Gugus Tugas Gerakan NTT Melayani	Mengoordinir dan melaksanakan serta bertanggungjawab terhadap operasional pelaksanaan kegiatan Gerakan NTT Melayani.
4.	Kepala Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Penanggungjawab Gugus Tugas Gerakan NTT Mandiri	Mengoordinir dan melaksanakan serta bertanggungjawab terhadap operasional pelaksanaan kegiatan Gerakan NTT Mandiri.
5.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Penanggungjawab Gugus Tugas Gerakan NTT Bersih	Mengoordinir dan melaksanakan serta bertanggungjawab terhadap operasional pelaksanaan kegiatan Gerakan NTT Bersih.
6.	Kepala Bidang Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Penanggungjawab Gugus Tugas Gerakan NTT Tertib	Mengoordinir dan melaksanakan serta bertanggungjawab terhadap operasional pelaksanaan kegiatan Gerakan NTT Tertib.

NY

7.	Kepala Sub. Bidang Ideologi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Penanggungjawab Gugus Tugas Gerakan NTT Bersatu	Mengoordinir dan melaksanakan serta bertanggungjawab terhadap operasional pelaksanaan kegiatan Gerakan NTT Bersatu.
8.	Kepala Sub. Bagian Keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Anggota	Membantu membuat laporan pelaksanaan Kegiatan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Provinsi NTT.
9.	Kepala Sub. Bagian PDE pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Anggota	Membantu membuat laporan pelaksanaan Kegiatan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Provinsi NTT.
10.	Antonio Wollo, S.Sos/Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu membuat laporan pelaksanaan Kegiatan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Provinsi NTT.
11.	Camilo Caeiro, S.Sos/Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu membuat laporan pelaksanaan Kegiatan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Provinsi NTT.
12.	Melkianus Beama, S.Sos/Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu membuat laporan pelaksanaan Kegiatan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Provinsi NTT.
13.	Drs. Kamang Kopong/Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu membuat laporan pelaksanaan Kegiatan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Provinsi NTT.
14.	Krisantus G. F. Monekaka, S.STP/Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu membuat laporan pelaksanaan Kegiatan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Provinsi NTT.

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



**JOSEF ADREANUS NAE SOI**